

RENCANA AKSI KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat terselesaikan. RAK merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta meningkatkan pencapaian sasaran sampai dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ditetapkan.

RAK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024, serta penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang bertujuan untuk mendongkrak pencapaian indikator kinerja dari level sasaran sampai dengan level kegiatan.

Secara substantif RAK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menjadi pendorong unit kerja pada struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program/kegiatan yang melekat yang berdampak pada pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RAK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan.

Purwakarta, 05 Januari 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta**



AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

19810623 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	SASARAN STRATEGIS DAN IKU SATPOL PP	1
	1.1. Sasaran Strategis	1
	1.2. IKU dan Formulasi Penghitungan Target Tahun 2024	2
	1.3. Landasan Hukum	3
	1.4. Dasar Pemikiran	5
	1.5. Struktur Satpol PP Kab. Purwakarta	5
BAB II	RENCANA AKSI SATPOL PP	6
	2.1. Rencana Aksi Satpol PP Kab. Purwakarta	6
BAB III	PENUTUP	12

BAB I
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PURWAKARTA

1.1. Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta didasarkan pada tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
2.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	

1.2. Indikator Kinerja Utama dan Formulasi Penghitungan Target Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran / IKU	Formulasi Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Capaian SAKIP Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%

1.3. Landasan Hukum.

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

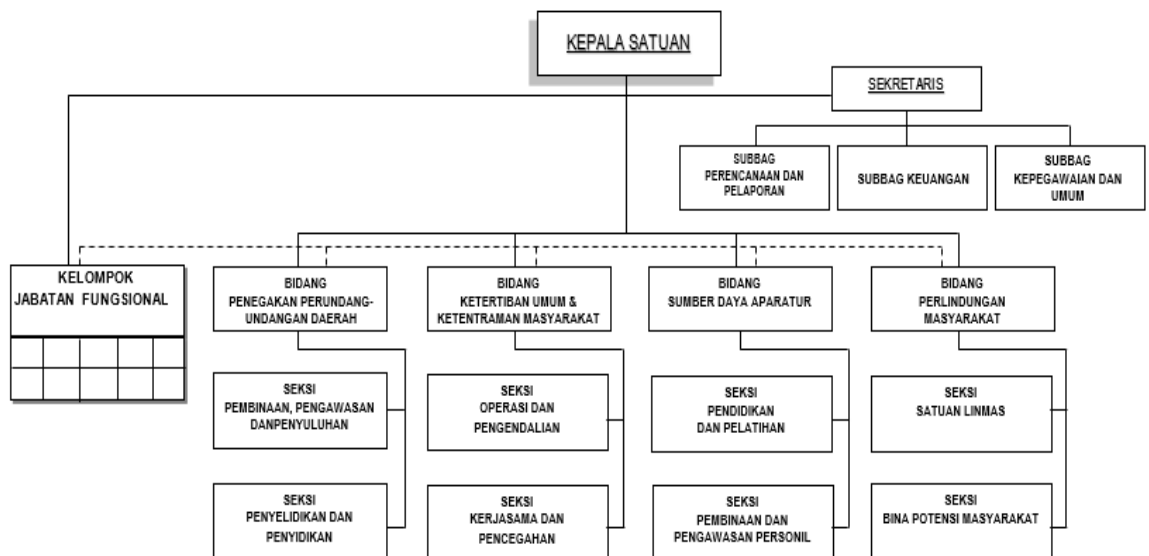
1.4. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024 ini, adalah :

1. Memacu pencapaian kinerja Satpol PP, baik pada ranah sasaran sampai dengan ranah pelaksanaan kegiatan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama.

1.5. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA



KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
AULIA PATUNGKAS, ST, M.Si
0810623 200604 1 008

BAB II

RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

2.1. Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja

RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik				Baik
	Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1 Dok	1 Dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dok		1 Dok		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkat Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	3 Bulan

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan kualitas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	4 Paket			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok		1 Dok		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatkan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok		1 Dok		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Meningkatkan kualitas Kinerja ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai	Meningkatkan kualitas Kinerja ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai	1 Dok				1 Dok
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan kualitas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Meningkatkan kualitas Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	1 Paket		1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3Laporan	3 Laporan	3Laporan

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.							
	Pengadaan mebel	Meningkatkan kualitas Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	40 Unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Meningkatkan kualitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		5 Unit	5 Unit	4 Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Meningkatkan kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatkan kualitas Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	158 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	14 Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.							
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Meningkatkan kualitas Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	35 Unit	7 Unit	7 Unit	8 Unit	8 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	5 Unit		2 Unit	1 Unit	1 Unit

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	100%	25%	25%	25%	25%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	100%	25%	25%	25%	25%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/	100%	25%	25%	25%	25%
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru x 100% dibagi 1 Wilayah kerja kabupaten/kota	100%	25%	25%	25%	25%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP x100%	100%	25%	25%	25%	25%
		Persentase Penegakan PERDA	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi Jumlah pelanggaran PERDA x 100%	100%	25%	25%	25%	25%
	Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :							
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah							

	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	Jumlah Laporan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	65 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	17 Laporan
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Meningkatkan kualitas Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	49 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13 Laporan
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan kualitas Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	65 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	17 Dok
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang			50 Orang	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Meningkatnya Kinerja ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang		

2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota							
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatkan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatkan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya Kinerja ASN Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan				2 Laporan

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan, yang mendukung pencapaian kinerja sasaran melalui penetapan Rencana Aksi pada setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Harapannya adalah meningkatkan kualitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksana urusan wajib pemerintah pelayanan dasar bidang ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Kinerja ini, dapat membantu pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Dengan demikian, sinergi dan keterhubungan antar unit dan/atau aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menjadi hal penting dalam rangka peningkatan budaya kerja yang lebih baik melalui peningkatan pola sikap, pola kerja, dan pola tindak pada seluruh komponen di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 05 Januari 2024

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta**



AULIA AMUNGKAS, ST, M.Si

19810623 200604 1 008